

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

SURAT EDARAN
Nomor SE- 22 /PB/2014

TENTANG
PENYESUAIAN BESARAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Umum

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109); dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);

telah ditetapkan besaran gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian diperlukan petunjuk lebih lanjut mengingat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud hanya mengatur bahwa besaran gaji pokok baru tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman pemahaman pada KPPN dalam pelaksanaan pembayaran atas penyesuaian besaran gaji pokok baru sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud.

C. Ruang Lingkup

1. Penyesuaian besaran gaji pokok.
2. Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok.
3. Tata cara pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji bagi Satker yang telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) dan Belanja Pegawai Polri (BPP).

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109); dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110).

E. Petunjuk penyesuaian besaran gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, besarannya agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud.
2. Pembayaran gaji bulan Juli 2014 sudah menggunakan besaran gaji pokok baru.
3. Dalam hal pengajuan SPM untuk pembayaran gaji bulan Juli 2014 masih menggunakan besaran gaji pokok yang lama, maka pembayaran gaji bulan Agustus 2014 sudah harus menggunakan besaran gaji pokok baru.
4. Pembayaran kekurangan gaji sejak bulan Januari 2014 sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok dimaksud dibuat dalam daftar tersendiri dan dapat dibayarkan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji induk dengan besaran gaji pokok baru diterbitkan.
5. Bagi satker yang telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) atau Belanja Pegawai Polri (BPP), pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji kepada KPPN disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi versi terbaru.
6. Prosedur penerbitan SP2D dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2014
Direktur Jenderal,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ... DIREKTUR JENDERAL

Marwanto Harjowiryono
NIP 195906061983121001

Tembusan :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I a	GOLONGAN I b	GOLONGAN I c	GOLONGAN I d
0	1.402.400			
1				
2	1.446.500			
3		1.531.500	1.596.300	1.663.800
4	1.492.100			
5		1.579.700	1.646.500	1.716.200
6	1.539.100			
7		1.629.500	1.698.400	1.770.200
8	1.587.600			
9		1.680.800	1.751.900	1.826.000
10	1.637.600			
11		1.733.700	1.807.100	1.883.500
12	1.689.200			
13		1.788.300	1.864.000	1.942.800
14	1.742.400			
15		1.844.700	1.922.700	2.004.000
16	1.797.200			
17		1.902.700	1.983.200	2.067.100
18	1.853.800			
19		1.962.700	2.045.700	2.132.200
20	1.912.200			
21		2.024.500	2.110.100	2.199.400
22	1.972.400			
23		2.088.300	2.176.600	2.268.700
24	2.034.600			
25		2.154.000	2.245.100	2.340.100
26	2.098.600			
27		2.221.900	2.315.800	2.413.800

MKG	GOLONGAN II a	GOLONGAN II b	GOLONGAN II c	GOLONGAN II d
0	1.816.900			
1	1.845.600			
2				
3	1.903.700	1.984.200	2.068.100	2.155.600
4				
5	1.963.600	2.046.700	2.133.300	2.223.500
6				
7	2.025.500	2.111.200	2.200.500	2.293.500
8				
9	2.089.300	2.177.700	2.269.800	2.365.800
10				
11	2.155.100	2.246.200	2.341.300	2.440.300
12				
13	2.223.000	2.317.000	2.415.000	2.517.200
14				
15	2.293.000	2.390.000	2.491.100	2.596.400
16				
17	2.365.200	2.465.200	2.569.500	2.678.200
18				
19	2.439.700	2.542.900	2.650.400	2.762.600
20				
21	2.516.500	2.623.000	2.733.900	2.849.600
22				
23	2.595.800	2.705.600	2.820.000	2.939.300
24				
25	2.677.500	2.790.800	2.908.800	3.031.900
26				
27	2.761.900	2.878.700	3.000.400	3.127.400
28				
29	2.848.800	2.969.300	3.094.900	3.225.900
30				
31	2.938.600	3.062.900	3.192.400	3.327.500
32				
33	3.031.100	3.159.300	3.293.000	3.432.300

MKG	GOLONGAN III a	GOLONGAN III b	GOLONGAN III c	GOLONGAN III d
0	2.317.600	2.415.600	2.517.800	2.624.300
1				
2	2.390.600	2.491.700	2.597.100	2.706.900
3				
4	2.465.900	2.570.200	2.678.900	2.792.200
5				
6	2.543.500	2.651.100	2.763.300	2.880.100
7				
8	2.623.600	2.734.600	2.850.300	2.970.800
9				
10	2.706.300	2.820.700	2.940.000	3.064.400
11				
12	2.791.500	2.909.600	3.032.600	3.160.900
13				
14	2.879.400	3.001.200	3.128.200	3.260.500
15				
16	2.970.100	3.095.700	3.226.700	3.363.200
17				
18	3.063.600	3.193.200	3.328.300	3.469.100
19				
20	3.160.100	3.293.800	3.433.100	3.578.400
21				
22	3.259.700	3.397.500	3.541.300	3.691.100
23				
24	3.362.300	3.504.500	3.652.800	3.807.300
25				
26	3.468.200	3.614.900	3.767.800	3.927.200
27				
28	3.577.400	3.728.800	3.886.500	4.050.900
29				
30	3.690.100	3.846.200	4.008.900	4.178.500
31				
32	3.806.300	3.967.300	4.135.200	4.310.100

MKG	GOLONGAN IV a	GOLONGAN IV b	GOLONGAN IV c	GOLONGAN IV d	GOLONGAN IV e
0	2.735.300	2.851.000	2.971.600	3.097.300	3.228.300
1					
2	2.821.400	2.940.800	3.065.200	3.194.800	3.330.000
3					
4	2.910.300	3.033.400	3.161.700	3.295.500	3.434.900
5					
6	3.002.000	3.128.900	3.261.300	3.399.300	3.543.000
7					
8	3.096.500	3.227.500	3.364.000	3.506.300	3.654.600
9					
10	3.194.000	3.329.100	3.470.000	3.616.700	3.769.700
11					
12	3.294.600	3.434.000	3.579.300	3.730.700	3.888.500
13					
14	3.398.400	3.542.200	3.692.000	3.848.200	4.010.900
15					
16	3.505.400	3.653.700	3.808.300	3.969.400	4.137.300
17					
18	3.615.800	3.768.800	3.928.200	4.094.400	4.267.600
19					
20	3.729.700	3.887.500	4.051.900	4.223.300	4.402.000
21					
22	3.847.200	4.009.900	4.179.500	4.356.300	4.540.600
23					
24	3.968.300	4.136.200	4.311.200	4.493.500	4.683.600
25					
26	4.093.300	4.266.500	4.447.000	4.635.100	4.831.100
27					
28	4.222.300	4.400.900	4.587.000	4.781.000	4.983.300
29					
30	4.355.200	4.539.500	4.731.500	4.931.600	5.140.200
31					
32	4.492.400	4.682.400	4.880.500	5.086.900	5.302.100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
ti Perundang-undangan
dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

GOLONGAN I – TAMTAMA

MKG	a PRAJURIT DUA KELASI DUA	b PRAJURIT SATU KELASI SATU	c PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	d KOPRAL DUA	e KOPRAL SATU	f KOPRAL KEPALA
1	2	3	4	5	6	7
0	1.476.600	1.522.700	1.570.300	1.619.400	1.670.000	1.722.300
1						
2	1.523.100	1.570.800	1.619.900	1.670.500	1.722.700	1.776.600
3						
4	1.571.200	1.620.300	1.670.900	1.723.200	1.777.000	1.832.600
5						
6	1.620.700	1.671.400	1.723.600	1.777.500	1.833.100	1.890.400
7						
8	1.671.800	1.724.100	1.778.000	1.833.500	1.890.900	1.950.000
9						
10	1.724.500	1.778.400	1.834.000	1.891.400	1.950.500	2.011.500
11						
12	1.778.900	1.834.500	1.891.900	1.951.000	2.012.000	2.074.900
13						
14	1.835.000	1.892.400	1.951.500	2.012.500	2.075.400	2.140.300
15						
16	1.892.900	1.952.000	2.013.100	2.076.000	2.140.900	2.207.800
17						
18	1.952.500	2.013.600	2.076.500	2.141.400	2.208.400	2.277.400
19						
20	2.014.100	2.077.100	2.142.000	2.209.000	2.278.000	2.349.200
21						
22	2.077.600	2.142.600	2.209.500	2.278.600	2.349.800	2.423.300
23						
24	2.143.100	2.210.100	2.279.200	2.350.500	2.423.900	2.499.700
25						
26	2.210.700	2.279.800	2.351.100	2.424.600	2.500.400	2.578.500
27						
28	2.280.400	2.351.700	2.425.200	2.501.000	2.579.200	2.659.800

GOLONGAN II – BINTARA

MKG	a SERSAN DUA	b SERSAN SATU	c SERSAN KEPALA	d SERSAN MAYOR	e PEMBANTU LETNAN DUA	f PEMBANTU LETNAN SATU
8	9	10	11	12	13	14
0	1.889.900	1.948.900	2.009.900	2.072.700	2.137.500	2.204.300
1						
2	1.949.500	2.010.400	2.073.200	2.138.000	2.204.900	2.273.800
3						
4	2.010.900	2.073.800	2.138.600	2.205.500	2.274.400	2.345.500
5						
6	2.074.300	2.139.200	2.206.000	2.275.000	2.346.100	2.419.500
7						
8	2.139.700	2.206.600	2.275.600	2.346.700	2.420.100	2.495.800
9						
10	2.207.200	2.276.200	2.347.400	2.420.700	2.496.400	2.574.400
11						
12	2.276.800	2.348.000	2.421.400	2.497.100	2.575.100	2.655.600
13						
14	2.348.600	2.422.000	2.497.700	2.575.800	2.656.300	2.739.400
15						
16	2.422.700	2.498.400	2.576.500	2.657.000	2.740.100	2.825.700
17						
18	2.499.100	2.577.200	2.657.700	2.740.800	2.826.500	2.914.800
19						
20	2.577.900	2.658.400	2.741.500	2.827.200	2.915.600	3.006.800
21						
22	2.659.100	2.742.300	2.828.000	2.916.400	3.007.500	3.101.600
23						
24	2.743.000	2.828.700	2.917.200	3.008.300	3.102.400	3.199.400
25						
26	2.829.500	2.917.900	3.009 100	3.103.200	3.200.200	3.300.200
27						
28	2.918.700	3.009.900	3.104.000	3.201.100	3.301.100	3.404.300
29						
30	3.010.700	3.104.800	3.201.900	3.302.000	3.405.200	3.511.700
31						
32	3.105.700	3.202.700	3.302.900	3.406.100	3.512.600	3.622.400

GOLONGAN III – PERWIRA PERTAMA

MKG	a LETNAN DUA	b LETNAN SATU	c KAPTEN
15	16	17	18
0	2.457.000	2.533.800	2.613.000
1	2.495.100		
2		2.613.700	2.695.400
3	2.573.800		
4		2.696.100	2.780.400
5	2.654.900		
6		2.781.100	2.868.000
7	2.738.600		
8		2.868.800	2.958.500
9	2.825.000		
10		2.959.200	3.051.700
11	2.914.100		
12		3.052.500	3.148.000
13	3.006.000		
14		3.148.800	3.247.200
15	3.100.700		
16		3.248.100	3.349.600
17	3.198.500		
18		3.350.500	3.455.200
19	3.299.400		
20		3.456.200	3.564.200
21	3.403.400		
22		3.565.100	3.676.600
23	3.510.700		
24		3.677.500	3.792.500
25	3.621.400		
26		3.793.500	3.912.100
27	3.735.600		
28		3.913.100	4.035.500
29	3.853.400		
30		4.036.500	4.162.700
31	3.974.900		
32		4.163.800	4.294.000

GOLONGAN IV – PERWIRA MENENGAH / PERWIRA TINGGI

MKG	a MAYOR	b LETNAN KOLONEL	c KOLONEL	d BRIGADIR JENDERAL LAKS. PERTAMA MARS. PERTAMA	e MAYOR JENDERAL LAKS.MUDA MARS.MUDA	f LETNAN JENDERAL LAKS.MADYA MARS.MADYA	g JENDERAL LAKSAMANA MARSEKAL
19	20	21	22	23	24	25	26
0	2.694.600	2.778.900	2.865.700	2.955.300	3.047.700		
1							
2	2.779.600	2.866.500	2.956.100	3.048.500	3.143.800		
3							
4	2.867.300	2.956.900	3.049.300	3.144.600	3.242.900		
5							
6	2.957.700	3.050.100	3.145.500	3.243.800	3.345.200		
7							
8	3.050.900	3.146.300	3.244.700	3.346.100	3.450.700		
9							
10	3.147.100	3.245.500	3.347.000	3.451.600	3.559.500		
11							
12	3.246.400	3.347.900	3.452.500	3.560.400	3.671.700		
13							
14	3.348.700	3.453.400	3.561.400	3.672.700	3.787.500		
15							
16	3.454.300	3.562.300	3.673.700	3.788.500	3.906.900		
17							
18	3.563.300	3.674.600	3.789.500	3.908.000	4.030.100		
19							
20	3.675.600	3.790.500	3.909.000	4.031.200	4.157.200		
21							
22	3.791.500	3.910.000	4.032.300	4.158.300	4.288.300		
23							
24	3.911.100	4.033.300	4.159.400	4.289.400	4.423.500	4.561.800	4.704.400
25							
26	4.034.400	4.160.500	4.290.600	4.424.700	4.563.000	4.705.600	4.852.700
27							
28	4.161.600	4.291.700	4.425.800	4.564.200	4.706.900	4.854.000	5.005.700
29							
30	4.292.800	4.427.000	4.565.400	4.708.100	4.855.300	5.007.100	5.163.600
31							
32	4.428.200	4.566.600	4.709.400	4.856.600	5.008.400	5.164.900	5.326.400

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

	GOLONGAN I					
	TAMTAMA					
	a	b	c	d	e	f
MKG	BHAYANG KARA DUA	BHAYANG KARA SATU	BHAYANG KARA KEPALA	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	AJUN BRIGADIR POLISI KEPALA
1	2	3	4	5	6	7
0	1.476.600	1.522.700	1.570.300	1.619.400	1.670.000	1.722.300
1						
2	1.523.100	1.570.800	1.619.900	1.670.500	1.722.700	1.776.600
3						
4	1.571.200	1.620.300	1.670.900	1.723.200	1.777.000	1.832.600
5						
6	1.620.700	1.671.400	1.723.600	1.777.500	1.833.100	1.890.400
7						
8	1.671.800	1.724.100	1.778.000	1.833.500	1.890.900	1.950.000
9						
10	1.724.500	1.778.400	1.834.000	1.891.400	1.950.500	2.011.500
11						
12	1.778.900	1.834.500	1.891.900	1.951.000	2.012.000	2.074.900
13						
14	1.835.000	1.892.400	1.951.500	2.012.500	2.075.400	2.140.300
15						
16	1.892.900	1.952.000	2.013.100	2.076.000	2.140.900	2.207.800
17						
18	1.952.500	2.013.600	2.076.500	2.141.400	2.208.400	2.277.400
19						
20	2.014.100	2.077.100	2.142.000	2.209.000	2.278.000	2.349.200
21						
22	2.077.600	2.142.600	2.209.500	2.278.600	2.349.800	2.423.300
23						
24	2.143.100	2.210.100	2.279.200	2.350.500	2.423.900	2.499.700
25						
26	2.210.700	2.279.800	2.351.100	2.424.600	2.500.400	2.578.500
27						
28	2.280.400	2.351.700	2.425.200	2.501.000	2.579.200	2.659.800

	GOLONGAN II					
	BINTARA					
	a	b	c	d	e	f
MKG	BRIGADIR POLISI DUA	BRIGADIR POLISI SATU	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI KEPALA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU
8	9	10	11	12	13	14
0	1.889.900	1.948.900	2.009.900	2.072.700	2.137.500	2.204.300
1						
2	1.949.500	2.010.400	2.073.200	2.138.000	2.204.900	2.273.800
3						
4	2.010.900	2.073.800	2.138.600	2.205.500	2.274.400	2.345.500
5						
6	2.074.300	2.139.200	2.206.000	2.275.000	2.346.100	2.419.500
7						
8	2.139.700	2.206.600	2.275.600	2.346.700	2.420.100	2.495.800
9						
10	2.207.200	2.276.200	2.347.400	2.420.700	2.496.400	2.574.400
11						
12	2.276.800	2.348.000	2.421.400	2.497.100	2.575.100	2.655.600
13						
14	2.348.600	2.422.000	2.497.700	2.575.800	2.656.300	2.739.400
15						
16	2.422.700	2.498.400	2.576.500	2.657.000	2.740.100	2.825.700
17						
18	2.499.100	2.577.200	2.657.700	2.740.800	2.826.500	2.914.800
19						
20	2.577.900	2.658.400	2.741.500	2.827.200	2.915.600	3.006.800
21						
22	2.659.100	2.742.300	2.828.000	2.916.400	3.007.500	3.101.600
23						
24	2.743.000	2.828.700	2.917.200	3.008.300	3.102.400	3.199.400
25						
26	2.829.500	2.917.900	3.009.100	3.103.200	3.200.200	3.300.200
27						
28	2.918.700	3.009.900	3.104.000	3.201.100	3.301.100	3.404.300
29						
30	3.010.700	3.104.800	3.201.900	3.302.000	3.405.200	3.511.700
31						
32	3.105.700	3.202.700	3.302.900	3.406.100	3.512.600	3.622.400

	GOLONGAN III		
	PERWIRA PERTAMA		
	a	b	c
MKG	INSPEKTUR POLISI DUA	INSPEKTUR POLISI SATU	AJUN KOMISARIS POLISI
15	16	17	18
0	2.457.000	2.533.800	2.613.000
1	2.495.100		
2		2.613.700	2.695.400
3	2.573.800		
4		2.696.100	2.780.400
5	2.654.900		
6		2.781.100	2.868.000
7	2.738.600		
8		2.868.800	2.958.500
9	2.825.000		
10		2.959.200	3.051.700
11	2.914.100		
12		3.052.500	3.148.000
13	3.006.000		
14		3.148.800	3.247.200
15	3.100.700		
16		3.248.100	3.349.600
17	3.198.500		
18		3.350.500	3.455.200
19	3.299.400		
20		3.456.200	3.564.200
21	3.403.400		
22		3.565.100	3.676.600
23	3.510.700		
24		3.677.500	3.792.500
25	3.621.400		
26		3.793.500	3.912.100
27	3.735.600		
28		3.913.100	4.035.500
29	3.853.400		
30		4.036.500	4.162.700
31	3.974.900		
32		4.163.800	4.294.000

	GOLONGAN IV						
	PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI			
	a	b	c	d	e	f	g
MKG	KOMISARIS POLISI	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI	JENDERAL POLISI
19	20	21	22	23	24	25	26
0	2.694.600	2.778.900	2.865.700	2.955.300	3.047.700		
1							
2	2.779.600	2.866.500	2.956.100	3.048.500	3.143.800		
3							
4	2.867.300	2.956.900	3.049.300	3.144.600	3.242.900		
5							
6	2.957.700	3.050 100	3.145.500	3.243.800	3.345.200		
7							
8	3.050.900	3.146.300	3.244.700	3.346.100	3.450.700		
9							
10	3.147.100	3.245.500	3.347.000	3.451.600	3.559.500		
11							
12	3.246.400	3.347.900	3.452.500	3.560.400	3.671.700		
13							
14	3.348.700	3.453.400	3.561.400	3.672.700	3.787.500		
15							
16	3.454.300	3.562.300	3.673.700	3.788.500	3.906.900		
17							
18	3.563.300	3.674.600	3.789.500	3.908.000	4.030.100		
19							
20	3.675.600	3.790.500	3.909.000	4.031.200	4.157.200		
21							
22	3.791.500	3.910.000	4.032.300	4.158.300	4.288.300		
23							
24	3.911.100	4.033.300	4.159.400	4.289.400	4.423.500	4.561.800	4.704.400
25							
26	4.034.400	4.160.500	4.290.600	4.424.700	4.563.000	4.705.600	4.852.700
27							
28	4.161.600	4.291.700	4.425.800	4.564.200	4.706.900	4.854.000	5.005.700
29							
30	4.292.800	4.427.000	4.565.400	4.708.100	4.855.300	5.007.100	5.163.600
31							
32	4.428.200	4.566.600	4.709.400	4.856.600	5.008.400	5.164.900	5.326.400

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan